



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018 - 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018 -2022;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor);
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2018;
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018 Nomor 126).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
BARAT DAYA TAHUN 2018 – 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai unsure penyelenggara Pemerintah

Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdiri dari Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK);

3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah.
6. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penetapan IKU dimaksudkan sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan SKPK untuk :
 - a. Rencana Jangka Menengah/Rencana Strategis
 - b. Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja
 - c. Perjanjian Kinerja
 - d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
 - e. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja
 - f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan SKPK bertujuan:
 - a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
 - a. IKU Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. IKU SKPK.

- (2) IKU Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) IKU SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

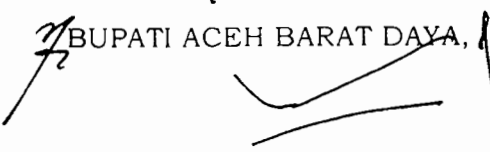
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Bupati ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie

pada tanggal 7 Mei 2018 M
21 Sya'ban 1439 H

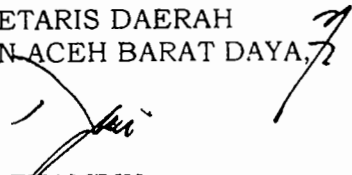
BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie

pada tanggal 8 Mei 2018 M
22 Sya'ban 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,


THAMRIN

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
 NOMOR 23 TAHUN 2018
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

1. Pemerintah : Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Kewenangan : Daerah
3. Indikator Kinerja Utama : Tahun 2018-2022

Kategori		Indikator Kinerja Utama (2018-2022)		Sektor	
Kategori		Indikator Kinerja Utama (2018-2022)		Sektor	
1.	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar/ Syariat Islam	Terinternalisasinya nilai-nilai keislaman dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh Barat Daya;	1. Angka kriminalitas yang ditangani;	Dinas Syariat Islam dan Dayah	
			2. Persentase penurunan jumlah pelanggaran syari'at Islam;	Dinas Syariat Islam dan Dayah	
			3. Jumlah Penerimaan Infaq/sadaqah;	Baitul Mal	
			4. Jumlah Calon Hafidz dan Hafidzah yang di bantu biaya pendidikan;	Dinas Syariat Islam dan Dayah	
			5. Jumlah Dayah terakreditasi	Dinas Syariat Islam dan Dayah	
2.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar/ Pendidikan	Meningkatnya peran pelaku seni dan pelaksanaan kehidupan adat dalam mendukung pembangunan masyarakat di Aceh Barat Daya;	1. Persentase jumlah sanggar seni yang aktif.	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
3.	Urusan Penunjang / Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien dalam mewujudkan reformasi birokrasi;	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);	Bagian Orpeg Setdakab	
			2. Nilai Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten;	Bagian Orpeg Setdakab	
			3. Nilai opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah;	Dinas Keuangan Kabupaten	
			4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);	Dinas Keuangan Kabupaten	
			5. % Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPd	Bappeda	
			6. % Usulan Musrembang yang terealisasi dalam Rencana Anggaran Kabupaten	Bappeda	
			7. Nilai Tingkat Maturitas SPIP.	Inspektorat	
4.	Urusan Pilihan/ Pengembangan Sektor Produksi (Kelautan, Pertanian dan	Meningkatnya produksi dan produktifitas sektor pertanian, kelautan dan kehutanan;	1. Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian;	Dinas Pertanian dan Pangan	
			2. Meningkatnya Produktivitas Hasil Pertanian;	Dinas Pertanian dan Pangan	
			3. Meningkatnya Produksi Hasil Perkebunan;	Dinas Pertanian dan Pangan	

	Perkebunan)		4. Meningkatnya Produktivitas Hasil Perkebunan;	Dinas Pertanian dan Pangan	
			5. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Peternakan;	Dinas Pertanian dan Pangan	
			6. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan;	Dinas Pertanian dan Pangan	
			7. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perikanan dan Kelautan.	Dinas Kelautan dan Perikanan	
5.	Urusan Pilihan / Pembukaan Lapangan Kerja	Mewujudkan kemudahan akses permodalan dan pasar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat;	1. Persentase pembentukan lembaga keuangan syariah.	Disperindagkop	
			2. % peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi	Bappeda	
6.	Urusan Pilihan / Pembukaan Lapangan Kerja	Terwujudnya pembangunan kawasan ekonomi Agro-Maritim dan tumbuhnya sentra-sentra industri pengolahan dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru;	1. Jumlah desa yang ditetapkan sebagai kawasan hutan adat;	Dinas Pertanian dan Pangan	
			2. Jumlah BUMG yang memiliki kapasitas untuk mengelola usaha-usaha pasca panen;	Dinas BPM P4	
			3. Jumlah sentra industri pengolahan hasil perkebunan, laut dan hasil hutan;	Disperindagkop	
			4. Jumlah kunjungan wisatawan;	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			5. Tingkat pengangguran terbuka.	Bappeda	
			6. % Penurunan Angka Kemiskinan	Bappeda	
7.	Urusan Wajib Pelayanan dasar/Infrastruktur yang mendukung Pertumbuhan ekonomi	Terwujudnya konsep pembangunan berkelanjutan dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur strategis;	1. Persentase kondisi jalan yang baik;	Dinas PU PR	
			2. Panjang Saluran Irigasi yang Terbangun	Dinas PU PR	
			3. Jumlah pengembangan kawasan strategis	Bappeda	
			4. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan.	Dinas Perhubungan	
8.	Urusan Penunjang / Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya pembaharuan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Barat Daya;	1. Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan dengan RTRW.	Bappeda	
9.	Urusan Wajib Pelayanan dasar/Infrastruktur yang mendukung Pertumbuhan ekonomi	Terlaksananya pengelolaan sektor SDA sesuai peruntukan dalam rangka pengurangan resiko bencana;	1. Persentase penanganan bencana.	BPBD	
10.	Urusan Wajib Pelayanan dasar/Infrastruktur yang	Tersedianya kebutuhan untuk Masyarakat rentan terkait pangan, perumahan, air bersih,	1. Jumlah masyarakat yang didampingi dalam penyelesaian kasus hukum;	Bagian Hukum Setdakab	

	mendukung Pertumbuhan ekonomi	energi, santunan melahirkan dan Bantuan hukum;	2. Persentase rumah tangga pengguna air bersih;	Dinas Perkim LH	
			3. Jumlah rumah layak huni yang terbangun;	Dinas Perkim LH	
			4. Persentase cakupan layanan rumah tangga yang memanfaatkan energi listrik.	DPMPTSP	
11.	Urusan Penunjang / Penanggulang anKemiskinan	Terpenuhinya jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat Aceh Barat Daya;	1. Persentase masyarakat penerima bantuan sosial.	Dinas Sosial	
12.	Urusan Pilihan / Pembukaan Lapangan Kerja	Terwujudnya pemuda Aceh Barat Daya yang mandiri, aktif dan berprestasi.;	1. Jumlah wirausaha muda;	Disperindagkop	
			2. Jumlah perolehan prestasi pada event olahraga;	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			3. Persentase OKP yang aktif.	Kesbangpol Linmas	
13.	Urusan Penunjang / Reformasi Bikrokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan di Aceh BaratDaya;	1. Jumlah keterwakilan perempuan dalam Jabatan Struktural.	BKPSDM	
13.	Urusan Wajib Pelayanan dasar/ Pendidikan;	Meningkatnya kualitas pendidikan pada semua jenjang yang memiliki daya saing tingkat nasional maupun regional;	1. Angka Rata-Rata lama sekolah;	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			2. Angka Partisipasi Murni : a. SD/MI b. SMP/MTs	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			3. Angka Partisipasi Murni : a. SD/MI b. SMP/MTs	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum berbasis Islami	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Angka Kelulusan : a. SD/MI b. SMP/MTs	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
14.	Urusan Wajib Pelayanan dasar/ Kesehatan;	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat Aceh Barat Daya.	Umur Harapan Hidup	Dinas Kesehatan	
			Angka Kematian Bayi	Dinas Kesehatan	
			Angka Kematian Ibu Melahirkan	Dinas Kesehatan	
			Prevalensi Gizi Buruk	Dinas Kesehatan	
			Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Dinas Kesehatan	


BUPATI ACEH BARAT DAYA,
AKMAL IBRAHIM

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA

NOMOR 23 TAHUN 2018

TANGGAL 7 Mei 2018 M
21 Sya'ban 1439 H

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2018-2022**

1. SETDAKAB

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Perbaikan tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatnya angka perolehan Nilai Standar Pelayanan Minimal	%	Persentase peningkatan Nilai SPM terhadap Nilai tahun sebelumnya	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (IKM)	%	Hasil perhitungan rata - rata terhadap 14 unsur pelayanan	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya Nilai Perolehan LAKIP Kabupaten	%	Rangkuman seluruh LAKIP SKPK sehingga yang disesuaikan dengan RENSTRA dan RPJMN sehingga tersusun LAKIP Daerah (Kabupaten)	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Aceh Barat Daya Komponen Pelaporan Kinerja	%	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten di Ukur sesuai dengan Permenpan No. 20/2013 tentang Juklak Evaluasi AKIP.	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Analisis Jabatan	ada/tidak	Pembagian tugas berdasarkan Jabatan dan Tupoksi PNS	Sekretariat Daerah
		Adanya Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (Nilai LPPD)	Nilai	Nilai LPPD merupakan Indeks Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD) Tim Nasional atas LPPD tahun sebelumnya, yang nilai berdasarkan Indeks Komposit dari dua variabel utama, yakni Indek Capaian Kinerja (ICK) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EKPPD dan Indeks Kesesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD	Sekretariat Daerah

		Persentase Kecamatan Berkinerja Baik	%	Pengukuran Kecamatan Berkinerja Baik dilaksanakan melalui Evaluasi Kinerja (Evkin) Camat berdasarkan penilaian pada bidang Pelayanan Publik, Kebersihan, Ketertiban dan Bidang Keindahan. berdasarkan Evaluasi Kinerja Camat pada akhir tahun, persentase kecamatan berkinerja baik di ukur melalui formulasi berikut : Jumlah Kecamatan yang masuk indeks nilai kategori A dan mendapat raport hijau dibandingkan jumlah kecamatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dikalikan 100%	Sekretariat Daerah
2.	Terciptanya pemerintah yang baik (good governance), bersih dan berwibwa (clean government) berdasarkan UUPA	Tersedianya buku berita daerah dan lembaran daerah	ada/tidak	Tersedianya buku berita daerah dan lembaran daerah	Sekretariat Daerah
3.	Meningkatnya kualitas dan keahlian SDM masyarakat (Mahasiswa)	Rasio Mahasiswa /(i) yang Terbantu Dana Pendidikannya	%	Jumlah mahasiswa yang Terbantu Dana Pendidikannya dibagi dengan Jumlah mahasiswa keseluruhan dikali 100%	Sekretariat Daerah
4.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Qanun / Pajak Daerah dan Retribusi yang telah disahkan	%	Jumlah rancangan Qanun Pajak Daerah yang di sahkan dibagi dengan Jumlah rancangan Qanun Pajak Daerah yang di ajukan dikali 100%	Sekretariat Daerah
5.	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	%	Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah, dilakukan penataan dalam penyusunan penyusunan produk hukum daerah (perda) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	Sekretariat Daerah

6.	Meningkatnya kualitas administrasi pembangunan	Persentase SKPK yang melaksanakan PBJ melalui ULP dan BIRMS	%	Jumlah SKPK yang menyusun ROP melaksanakan lelang melalui ULP dan BIRMS dibandingkan dengan seluruh SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya	Sekretariat Daerah
----	--	---	---	---	--------------------

2. SEKRETARIAT DPRK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRK Kabupaten Aceh Barat Daya	Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Barat Daya terhadap pelayanan sekretariat DPRK dalam memfasilitasi kegiatan	%	Jumlah Anggota DPRK yang puas dibagi dengan Jumlah Seluruh Anggota DPRK dikali 100%	Sekretariat DPRK Aceh Barat Daya
		Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	%	Realisasi fasilitasi rapat-rapat yang terlaksana tepat waktu dibagi dengan jumlah rapat-rapat yang terjadwalkan dikali 100%	Sekretariat DPRK Aceh Barat Daya
2.	Meningkatnya Kuantitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan	Persentase aspirasi yang terfasilitasi	%	Jumlah aspirasi yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah aspirasi yang masuk dikali 100%	Sekretariat DPRK Aceh Barat Daya

3. INSPEKTORAT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Terciptanya pemerintah yang baik (good governance), bersih dan berwibwa (clean government) berdasarkan UUPA	Hasil audit BPK dengan opini terbaik	Kategori	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya
		Menurunnya penyimpangan terhadap anggaran	%	Jumlah Temuan kerugian daerah	Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya

	Pemeriksaan Reguler Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK)	Meningkatnya jumlah laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya	%	Jumlah pemeriksaan reguler dibagi dengan jumlah SKPK dikalikan 100%	Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya
3.	Pemeriksaan Reguler Anggaran Dana Gampong/BKPG/PNPM	Meningkatnya jumlah laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler Anggaran Dana Gampong/BKPG/PNPM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya	%	Jumlah LHP secara reguler dibagi dengan jumlah gampong yang terealisasi Dana Gampong/BKPG/PNPM dikalikan 100%	Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya
4.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas aparatur pengawasan	Meningkatnya jumlah auditor yang bersertifikat	%	Jumlah auditor yang bersertifikat dikurang dengan auditor yang belum bersertifikat dibagi dengan jumlah auditor yang dibutuhkan dikalikan 100%	Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya
5.	Menurunnya temuan pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi	Persentase SKPK yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material	%	Jumlah SKPK yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material di bagi jumlah SKPK dikali 100%	Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya
6.	Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti	%	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang mendapatkan status tindak lanjut selesai dibagi Jumlah seluruh rekomendasi dikalikan 100%	Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	%	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang mendapatkan status tindak lanjut selesai dibagi Jumlah seluruh rekomendasi dikalikan 100%	Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya
7.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya	Persentase SKPK yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Minimal B	%	Jumlah SKPK yang nilai evaluasi AKIP nya minimal B dibagi jumlah seluruh SKPK yang dievaluasi dikalikan 100%	Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya
8.	Meningkatnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi	Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi	%	Jumlah APIP yang memiliki standar kompetensi dibagi jumlah seluruh APIP Inspektorat dikalikan 100%	Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya

4. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan	% Angka Melek Huruf	%	Jumlah masyarakat melek Huruf dibagi dengan Jumlah keseluruhan masyarakat dikali 100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		% Angka Kelulusan	%	Jumlah kelulusan siswa dibagi Jumlah keseluruhan siswa dikali 100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rasio guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	umlah guru berkualifikasi S1/D-IV dibagi dengan Jumlah Keseluruhan guru dikali 100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APK SD/MI/ PAKET A	%	Jumlah siswa yang sedang sekolah kelompok usia pendidikan SD/MI/ PAKET A dibagi dengan Jumlah penduduk kelompok usia pendidikan SD/MI/ PAKET A dikali 100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APK SMP/MTS/ PAKET B	%	Jumlah siswa yang sedang sekolah kelompok usia pendidikan SMP/MTS/ PAKET B dibagi dengan Jumlah penduduk kelompok usia pendidikan SMP/MTS/ PAKET B dikali 100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APK SMA/SMK/MA/PAKET C	%	Jumlah siswa yang sedang sekolah kelompok usia pendidikan SMA/SMK/MA/PAKET C dibagi dengan Jumlah penduduk kelompok usia pendidikan SMA/SMK/MA/PAKET C	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APM SD/MI/PAKET A	%	Jumlah siswa kelompok usia pendidikan SD/MI/PAKET A dibagi dengan Jumlah penduduk kelompok usia pendidikan SD/MI/PAKET A dikali 100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APM SMP/MTS/PAKET B	%	Jumlah siswa kelompok usia pendidikan SMP/MTS/PAKET B dibagi dengan Jumlah penduduk kelompok usia pendidikan SMP/MTS/PAKET B dikali 100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		APM SMA/SMK/MA/PAKET C	%	Jumlah siswa kelompok usia pendidikan SMA/SMK/MA/PAKET C dibagi dengan Jumlah penduduk kelompok usia pendidikan SMA/SMK/MA/PAKET C	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rata - rata Nilai UNAS SD/MI	%	Jumlah siswa yang lulus UNAS SD/MI dibagi dengan Jumlah siswa yang mengikuti UNAS SD/MI dikali 100%	Dinas Pendidikan
		Rata - rata Nilai UNAS SMP/MT	%	Jumlah siswa yang lulus UNAS SMP/MT dibagi dengan Jumlah siswa yang mengikuti UNAS SMP/MT dikali 100%	Dinas Pendidikan
2.	Meningkatnya kualitas, aksesibilitas layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat	APK PAUD usia 3 - 6 Tahun	%	Jumlah murid PAUD keseluruhan x 100 Jumlah penduduk usia 3 - 6 tahun	Dinas Pendidikan

5. DINAS KESEHATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	%	Jumlah kematian bayi dibagi dengan Jumlah keseluruhan bayi lahir dikali 100%	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi	%	Jumlah kelahiran selamat dibagi dengan Jumlah Ibu yang melahirkan dikali 100%	Dinas Kesehatan
		Rasio Posyandu per satuan Balita	%	Jumlah POSYANDU dibagi dengan Jumlah BALITA dikali 100%	Dinas Kesehatan
		Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization	%	Jumlah desa/kelurahan UCI dibagi dengan Jumlah seluruh desa / kelurahan dikali 100%	Dinas Kesehatan
		Cakupan Puskesmas yang menyelenggarakan rawat inap	%	Cakupan Puskesmas yang menyelenggarakan rawat inap dibagi dengan Jumlah keseluruhan PUSKESMAS dikali 100%	Dinas Kesehatan

		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelayanan Kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama dikali 100%	Dinas Kesehatan
		Cakupan kompilasi kebidanan yang ditangani	%	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di wilayah kerja pada waktu tertentu dibagi dengan Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama dikali 100%	Dinas Kesehatan
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	Jumlah ibu bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pd waktu tertentu dibagi dengan Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu dikali 100%	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan nifas	%	pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan Pelayanan ibu nifas yang diberikan meliputi : 1) Pemeriksaan tekanan darah,nadi, respirasi,dan suhu, 2) Pemeriksaan tinggi fundus uteri, 3) pemeriksaan lochia dan pengeluaran pervaginam lainnya, 4) Pemeriksaan payudara dan anjuran ASI eksklusif 6 bulan, 5) Pemberian kapsul Vitamin A 200000IU sebanyak 2 kali, dan 6) Pelayanan KB pasca persalinan	Dinas Kesehatan

		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	Neonatus adalah bayi berumur 0 – 28 hari Neonatus dengan komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian Neonatus dengan komplikasi seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir, BBLR (berat badan lahir rendah < 2500 gr), sindroma gangguan pernafasan, kelainan kongenital Perhitungan sasaran neonatus dengan komplikasi : dihitung berdasarkan 15% dari jumlah bayi baru lahir Jika tidak diketahui jumlah bayi baru lahir maka dapat dihitung dari Crude Birth Rate x jumlah penduduk Angka CBR dan jumlah penduduk Kab/Kota didapat dari data BPS	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan anak balita	%	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan Jumlah seluruh anak balita di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama dikali 100%	Dinas Kesehatan
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelayanan Kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama dikali 100%	Dinas Kesehatan
		Cakupan penjangkauan kesehatan Siswa SD setingkat	%	Jumlah siswa SD yang terjangkau kesehatan dibagi dengan Jumlah Keseluruhan Siswa SD dikali 100%	Dinas Kesehatan

		Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	%	Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam adalah Desa/kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani < 24 jam oleh Kab/Kota terhadap KLB periode/kurun waktu tertentu	Dinas Kesehatan
		Cakupan Desa Siaga Aktif	%	Cakupan Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveillance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk	Dinas Kesehatan
		Rasio tenaga para medis terhadap penduduk	%	Jumlah tenaga medis dibagi dengan Jumlah penduduk dikali 100%	Dinas Kesehatan
		Rasio dokter terhadap penduduk	%	Jumlah dokter dibagi dengan Jumlah penduduk dikali 100%	Dinas Kesehatan

6. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Cakupan Lahan Pertanian /Perkebunan yang dapat teraliri oleh irigasi (%)	%	Lahan Pertanian/Perkebunan yang teraliri irigasi (m) di bagi dengan Panjang Irigasi (m) dikali 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana pembangunan untuk mendukung investasi	Panjang jalan baru yang terbangun	%	Panjang jalan baru yang terbangun (Km) dibagi dengan Panjang jalan keseluruhan (Km) dikali 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jembatan baru yang terbangun	%	Jembatan baru yang terbangun dibagi dengan Jembatan keseluruhan dikali 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

		Cakupan jalan rusak yang diperbaiki	%	Panjang jalan yang diperbaiki (Km) dibagi dengan Panjang jalan keseluruhan (Km), dikali 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase pemakaian Air Bersih (PDAM)	%	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih dibagi dengan Jumlah seluruh rumah tangga dikali 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.	Terwujudnya tertib perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten	Persentase pembangunan gedung yang memiliki IMB	%	Jumlah gedung yang memiliki IMB dibagi jumlah Gedung keseluruhan yang wajib IMB x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Terwujudnya Infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata	Rasio minimal ruas Jalan dalam kondisi baik	%	Panjang jalan kondisi rusak dibagi Panjang jalan Kabupaten Aceh Barat Daya dikali 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Penyerapan Pembangunan Infrastruktur Jalan	%	Panjang jalan yang dilakukan peningkatan dibagi dengan jumlah Panjang jalan yang di targetkan untuk dilakukan peningkatan dikali 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

7. DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Terpeliharanya Kualitas lingkungan	Mata air yang terlindungi	%	(Jumlah mata air yang dilindungi / 25 mata air prioritas yang dilindungi) x 100 %	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan dan Lingkungan Hidup
		Persentase pengelolaan sampah	%	Jumlah sampah yang tertangani dibagi dengan jumlah hasil sampah dikalikan 100%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan dan Lingkungan Hidup
		Cakupan DAS yang direboisasi (Penghijauan)	%	Cakupan DAS tahun x dibagi dengan cakupan DAS -x dikalikan 100%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan dan Lingkungan Hidup
2.	Penyediaan Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Tersedianya perumahan murah masyarakat		jumlah perumahan murah masyarakat di bagi dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan perumahan murah tersebut dikali 100%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan dan Lingkungan Hidup

3.	Pembangunan sarana dan prasarana kawasan cepat tumbuh	Tersedianya Drainase yang baik dan terintegrasi		Drainase yang terintegrasi dibagi dengan jumlah jumlah Drainase yang ada dilaki 100%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan dan Lingkungan Hidup
----	---	---	--	--	--

8. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
	Meningkatnya kinerja dan pelayanan kepada masyarakat	Cakupan Penegakan PERDA dan/atau Peraturan Kepala Daerah (%)	%	umlah pelanggaran perda yang terselesaikan dibagi dengan Jumlah seluruh pelanggaran perda	Satpol PP Kabupaten Aceh Barat Daya
1.	Meningkatnya ketertiban umum	Cakupan Penyelesaian Penegakan Perda	%	Jumlah penyelesaian pelanggaran perda perwal dibagi jumlah pelanggaran perda perwal yang dilaporkan X 100%	Satpol PP Kabupaten Aceh Barat Daya
2.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Laporan yang diindaklanjuti dalam 24 jam	%	Jumlah Laporan yang ditindaklanjuti dalam 24 jam dibagi Jumlah Laporan yang Diterima X 100%	Satpol PP Kabupaten Aceh Barat Daya

9. DINAS SOSIAL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kinerja dan pelayanan kepada masyarakat	% Korban Bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat	%	Persentase korban bencana skala Kabupaten/Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Dinas Sosial
2.	Menurunnya jumlah dan persentase penduduk miskin	Menurunnya persentase penduduk miskin	%	Jumlah penduduk miskin dibagi dengan Jumlah keseluruhan penduduk	Dinas Sosial
		Persentase (%) PMKS yang tersantuni	%	Jumlah PMKS yag tersantuni dibagi dengan Jumlah PMKS yang seharusnya menerima santunan	Dinas Sosial
3.	Meningkatnya partisipasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Prosentase Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	%	Jumlah TKSK yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS dibagi dengan Jumlah Seluruhnya TKSK yang ada dikali 100%	Dinas Sosial

4.	Meningkatnya penanganan korban bencana alam/sosial	Prosentasi pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan	%	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan x 100% Jumlah korban bencana keseluruhan	Dinas Sosial
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	%	Jumlah masyarakat yang merasa puas atas pelayanan dibagi dengan Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan dikali 100%	Dinas Sosial

10. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kinerja dan pelayanan kepada masyarakat	% Penduduk yang telah memiliki e-KTP	%	Jumlah penduduk usia > 17 tahun yang memiliki E -KTP dibagi dengan Jumlah seluruh penduduk usia >17 tahun atau telah menikah dikalikan 100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 penduduk (%)	%	Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan Jumlah seluruh penduduk dikalikan 100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase penyelesaian penerbitan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian yang dapat diselesaikan tepat waktu	%	Jumlah KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian yang diterbitkan tepat waktu pada tahun X dibagi KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian yang didaftarkan pada tahun X dikalikan 100 persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	%	Jumlah KK yang diterbitkan dibagi jumlah kepala keluarga dikalikan 100 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	Jumlah penduduk yang lahir dan memperoleh kutipan akta kelahiran yang diterbitkan pada tahun X (perhitungan) dibagi jumlah kelahiran yang terjadi pada tahun X (sebelumnya) dikalikan 100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

		Cakupan Penerbitan Akta Kematian	%	Jumlah penduduk yang meninggal dan memperoleh kutipan akta kematian yang diterbitkan pada tahun X (perhitungan) dibagi jumlah kematian yang terjadi pada tahun X (sebelumnya) dikalikan 100 persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.	Meningkatnya Akurasi Data Kependudukan	Validitas Data Kependudukan	%	Jumlah penduduk yang telah divalidasi dibagi dengan jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya dikalikan 100 persen.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

11. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kinerja dan pelayanan kepada masyarakat	Rasio Pendampingan Keluarga Berencana Gampong (PPKBG) Terhadap Akseptor KB	%	Jumlah PPKBG dibagi dengan Jumlah Peserta Program KB Aktif dikali 100%	Dinas PMP4 Kabupaten Aceh Barat Daya
2.	Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan	cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan	%	Perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya dibagi perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor x 100%	Dinas PMP4 Kabupaten Aceh Barat Daya
3.	Meningkatnya peserta Keluarga Berencana	Persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif .	%	Jumlah peserta KB aktif dibagi jumlah pasangan usia subur x100%	Dinas PMP4 Kabupaten Aceh Barat Daya
4.	Meningkatnya pemahaman remaja dalam kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan (PUP)	Rata-rata usia kawin pertama	tahun	Jumlah kelompok umur yang pertama kawin (16 s/d 35) dibagi jumlah tahun kawin pertama	Dinas PMP4 Kabupaten Aceh Barat Daya
5.	Meningkatnya tahapan keluarga pra sejahtera dan KS I	persentase keluarga pra sejahtera dan KS I	%	Jumlah Pra KS dan KS I dibagi jumlah keluarga x 100%	Dinas PMP4 Kabupaten Aceh Barat Daya

12. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
	Pengembangan lingkungan yang kondusif bagi dunia usaha	Terciptanya promosi dan kerjasama investasi	%	jumlah usaha yang dipromosikan dibagi dengan jumlah kerja investasi di kali 100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.	Meningkatkan Jumlah Investor investasi di daerah	Jumlah Perusahaan yang berinvestasi	%	Jumlah Perusahaan yang berinvestasi dibagi Jumlah keseluruhan perusahaan dibagi 100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan	Rata-rata jumlah hari penyelesaian perizinan	%	Jumlah hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penerbitan izin dibagi dengan Jumlah hari penyelesaian izin sesuai dengan SOP.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

13. DINAS PERHUBUNGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya sarana angkutan umum yang aman	Persentase angkutan umum yang laik jalan	%	Kendaraan angkutan umum yang lulus uji dibagi jumlah kendaraan angkutan umum wajib uji x 100%	Dinas Perhubungan
2.	Perpindahan penggunaan moda angkutan	Rasio Pengguna kendaraan pribadi dan pengguna angkutan umum	%	Rasio pengguna angkutan pribadi dibandingkan dengan pengguna angkutan umum	Dinas Perhubungan

14. DINAS KOPERASI , USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya produktivitas perekonomian rakyat	Cakupan Koperasi Aktif (%)	%	Jumlah koperasi aktif dibagi jumlah keseluruhan koperasi dikali 100%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Cakupan Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (%)	%	Jumlah usaha mikro dan kecil dibagi dengan Jumlah seluruh UKM	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

		Persentase Koperasi Sehat.	%	Jumlah koperasi sehat dibagi jumlah koperasi aktif dikali 100%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2.	pertumbuhan (growth center) ekonomi	Jumlah Pasar Tradisional dan Modern yang terbangun	%	Jumlah Pasar Tradisional dan Modern yang terbangun dibagi dengan jumlah penduduk dikali 100%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.	Meningkatnya SDM Koperasi dan UKM	Persentase SDM Koperasi yang berkualitas;	%	(Exsisting yang telah didiklat + Jumlah yang didiklat)x60%/jumlah koperasi aktif x 100 %	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
4.	Meningkatnya pelaku usaha koperasi, UKM, industri dan perdagangan yang memiliki izin	Persentase Legalitas pelaku usaha sektor perdagangan, koperasi, UKM dan Industri	Pelaku Usaha (%)	Jumlah pedagang, koperasi, UKM dan Industri yang memiliki izin di bagi dengan jumlah pedagang, koperasi, UKM, industri yang ada dikalikan 100 %	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

15. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya produktivitas perekonomian rakyat	Produktivitas Padi Per Hektare	%	Produktivitas tanaman padi (ton) dibagi Luas areal tanaman padi (ton) dikali 100%	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pertanian dan Pangan
2.	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Cakupan Lahan Pertanian /Perkebunan yang dapat teraliri oleh irigasi (%)	%	Lahan Pertanian/Perkebunan yang teraliri irigasi (m) di bagi dengan Panjang Irigasi (m) dikali 100%	Dinas Pertanian dan Pangan
3.	Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah	Cakupan lahan persawahan rakyat yang terbantu pengadaan bibitnya.	%	Luas lahan persawahan rakyat yang terbantu pengadaan bibit dibagi dengan Jumlah pengadaan bibit di kali 100%	Dinas Pertanian dan Pangan
4.	Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil pertanian dan Perternakan	Produktivitas tanaman padi	Pkw/ha	Cara Pengukuran Indikator Produktivitas tanaman padi adalah : $\text{Produktivitas} = \frac{\text{Produksi (Kw)}}{\text{Luas Panen (Ha)}}$	Dinas Pertanian dan Pangan
		Persentase Kelompok masyarakat yang terbantu bibit ternak unggul	%	Indikator ini diukur melalui jumlah kelompok masyarakat yang menerima bantuan dibagi dengan jumlah kelompok yang mengajukan proposal dikali 100%	Dinas Pertanian dan Pangan
5.	Meningkatnya kinerja dan pelayanan kepada masyarakat	Rasio Tenaga Penyuluh Pertanian terhadap Luas Areal Persawahan	%	Jumlah Penyuluh Pertanian dibagi dengan Luas Areal Persawahan dikalikan 100%	Dinas Pertanian dan Pangan

6.	Meningkatnya kapasitas penyuluh dan kelembagaanya	Persentase penyuluh Aparatur yang dilatih	%	Jumlah penyuluh Aparatur yang terlatih dibagi dengan jumlah penyuluh Aparatur yang ada dikalikan 100%	Dinas Pertanian dan Pangan
		Persentase penyuluh Non Aparatur yang dilatih	%	Jumlah penyuluh non Aparatur yang terlatih dibagi dengan jumlah penyuluh non Aparatur yang ada dikalikan 100%	Dinas Pertanian dan Pangan
7.	Meningkatnya kapasitas pelaku utama, pelaku usaha dan kelembagaannya	Persentase pelaku utama yang dilatih	%	Jumlah pelaku utama yang terlatih dibagi dengan jumlah pelaku utama yang ada dikalikan 100%	Dinas Pertanian dan Pangan
		Persentase pelaku usaha yang dilatih	%	Jumlah pelaku usaha yang terlatih dibagi dengan jumlah pelaku usaha yang ada dikalikan 100%	Dinas Pertanian dan Pangan
8.	Meningkatnya kapasitas informasi dan teknologi	Jumlah kaji terap teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan	Jumlah	ada/tidak	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah percontohan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan	Jumlah	ada/tidak	Dinas Pertanian dan Pangan

16. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya produktivitas perekonomian rakyat	Produktivitas Hasil Perikanan	%	Jumlah produksi ikan (ton) dibagi dengan Target Daerah (ton) dikali 100%	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	%	Jumlah produksi tahun berjalan kurang Jumlah produksi tahun lalu dibagi dengan Jumlah produksi tahun lalu dikali 100%	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	%	Jumlah produksi tahun berjalan kurang Jumlah produksi tahun lalu dibagi dengan Jumlah produksi tahun lalu dikali 100%	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Rasio Nelayan yang Memiliki Sarana Tangkap dan Pengolahan Ikan	%	Jumlah nelayan yang memiliki sarana tangkap dan pengolahan ikan dibagi dengan jumlah nelayan keseluruhan dikali 100%	Dinas Kelautan dan Perikanan

17. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Persentase pemustaka pertahun	%	Jumlah Pemustaka/Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya Usia 5-59 Th X 100 %	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Barat Daya
2.	Meningkatnya Keanekaragaman Bahan Pustaka	Jumlah Koleksi Bahan Pustaka	%	Akumulasi Jumlah Koleksi Bahan Pustaka	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Barat Daya
3.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan	%	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Barat Daya

18. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Perbaikan tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA (Qanun)	dokumen	Ada / Tidak	Bappeda Aceh Barat Daya
		Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA (Qanun)	dokumen	Ada / Tidak	Bappeda Aceh Barat Daya
		Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA (Perbup)	dokumen	Ada / Tidak	Bappeda Aceh Barat Daya
		% Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	Ada / Tidak	Bappeda Aceh Barat Daya
		Tersedianya Buku "Kabupaten Dalam Angka "	dokumen	Ada / Tidak	Bappeda Aceh Barat Daya
		Tersedianya Buku "PDRB Kabupaten"	dokumen	Ada / Tidak	Bappeda Aceh Barat Daya

2.	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPK terhadap RPJMK	%	Keselarasan Jumlah Indikator Program Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD X 100 % Program = RPJMD Jumlah indikator Program pada RPJMD	Bappeda Aceh Barat Daya
		Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD	%	Keselarasan Jumlah Indikator Program Pada Renstra SKPK yang sesuai dengan RPJMD X 100 % Indikator Program = Jumlah Indikator Program pada RPJMD	Bappeda Aceh Barat Daya
		Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD	%	Keselarasan Jumlah Indikator Kegiatan Pada Renja SKPD yang sesuai dengan X 100 % Indikator Kegiatan = RKPD	Bappeda Aceh Barat Daya
3.	Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Persentase Pagu Belanja Langsung RKPD yang Mengakomodir Usulan Masyarakat Melalui Musrenbang diakomodir	%	Jumlah alokasi anggaran Belanja Langsung yang terakomodir untuk kegiatan yang berasal aspirasi masyarakat hasil Musrenbang dibagi dengan aspirasi hasil musrenbang dikalikan 100 %	Bappeda Aceh Barat Daya
4.	Terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan yang Sesuai dengan perencanaan	%	Jumlah Program yang Dilaksanakan oleh SKPK X 100 % Jumlah Program yang Direncanakan dalam RKPK	Bappeda Aceh Barat Daya

19. BADAN KEUANGAN KABUPATEN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Nilai Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Kategori/ Nilai	Meningkatnya Hasil Evaluasi/Opini BPK RI	Badan Keuangan

2.	Penyusunan laporan keuangan serta proses APBK Kabupaten Aceh Barat Daya	Persentase Jumlah Pejabat Penatausahaan Keuangan yang dapat menyajikan laporan keuangan dengan benar berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan	%	Jumlah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK yang dapat menyajikan laporan keuangan dengan benar berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dibagi Jumlah Seluruh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK di lingkungan kab. Aceh Barat Daya dikali 100%	Badan Keuangan
		Penetapan APBK Kabupaten Aceh Barat Daya Tepat Waktu	Tepat Waktu	Penetapan APBK Tepat Waktu Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Badan Keuangan
3.	Terlaksananya tertib administrasi dan sistem informasi pengelolaan aset daerah dan barang milik daerah	Persentase Jumlah Kendaraan Dinas (Roda 4 dan Roda 2) Yang Layak Pakai	%	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Layak Pakai dibagi Jumlah Seluruh Kendaraan Dinas pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat daya x 100%	Badan Keuangan
		Jumlah aset daerah yang sudah bersertifikat	%	Jumlah lahan aset daerah yang sudah bersertifikat dibagi jumlah seluruh lahan aset daerah x 100%	Badan Keuangan
4.	Meningkatnya Pendapatan Daerah dan kesadaran masyarakat terhadap PAD	Persentase peningkatan PAD	%	Realisasi Peningkatan PAD dibagi dengan Realisasi Tahun sebelumnya di kali 100%	Badan Keuangan
5.	Meningkatnya Sumber-sumber Pendapatan yang baru	Penjaringan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah	%	Realisasi Pendapatan lainnya yang sah dibagi dengan seluruh Badan usaha/kegiatannya yang wajib pajak dikalikan 100%	Badan Keuangan

20. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi	%	Jumlah Pegawai yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial (Diklat PIM II, III dan PIM IV) dibagi dengan jumlah pejabat struktural x 100%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

2.	Meningkatnya kualitas dan keahlian SDM Aparatur pemerintah	Cakupan Dana APBK untuk peningkatan/profesionalisme PNS (%)	%	Jumlah alokasi anggaran dibagi dengan APBK dikali 100%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah pegawai ASN yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan kebutuhan formasi	%	Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.	Meningkatnya disiplin pegawai ASN	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin pegawai ASN	%	Jumlah kasus yang ditangani dibagi dengan jumlah kasus dikalikan 100%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase SKPK yang tidak terdapat pelanggaran disiplin	%	Jumlah SKPK yang tidak terdapat pelanggaran disiplin dibagi dengan jumlah total SKPK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase tingkat kehadiran pegawai ASN	%	Persentase kehadiran PNS per bulan dibagi jumlah bulan dikalikan 100%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.	Meningkatnya pemenuhan hak-hak kepegawaian ASN	Persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan	%	Pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya dibagi dengan jumlah seluruh pegawai Kabupaten Aceh Barat Daya di kali 100 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	%	Jumlah usulan kenaikan pangkat pegawai selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah usulan kenaikan pangkat pegawai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dan Persentase kenaikan gaji berkala pegawai tepat waktu	%	Jumlah usulan kenaikan gaji berkala pegawai selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah usulan kenaikan gaji berkala pegawai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dan Persentase pensiun pegawai tepat waktu	%	Jumlah usulan pensiun pegawai selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah usulan pensiun pegawai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

		Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	%	Hasil survey/kuesioner dari pengguna pelayanan (PNS Kabupaten Aceh Barat Daya)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6.	Tersedianya akurasi data kepegawaian	Persentase pegawai yang datanya akurat	%	Jumlah pegawai yang datanya akurat dibagi dengan jumlah pegawai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

21. DINAS SYARIAT ISLAM DAN DAYAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Terciptanya sosial budaya masyarakat berdasarkan Syariat Islam	Cakupan Penegakan Syariat Islam secara Kaffah (%)		Jumlah pelanggaran tahun (X) - Jumlah pelanggaran tahun (X-1) dibagi dengan Jumlah pelanggaran tahun (X-1)	Dinas Syariat Islam, Satpol PP &WH
2.	Meningkatnya dan nilai-nilai keagamaan masyarakat sesuai dengan syariat islam	Menurunnya tingkat pelanggaran Qanun Syariat islam	%	Jumlah pelanggaran Syari'at Islam Tahun ini dibagi Jumlah pelanggaran Syari'at Islam Tahun lalu dikali 100%	Dinas Syariat Islam, Satpol PP &WH
		Meningkatnya dakwah dan syiar Islam	%	Jumlah dakwah dan syiar Islam Tahun ini dibagi Jumlah dakwah dan syiar Islam Tahun lalu dikali 100%	Dinas Syariat Islam
3.	Meningkatnya peran dan fungsi ulama dalam pemberdayaan ummat dan pengayom dalam kehidupan keagamaan	Persentase pembangunan yang bernuansa Islami	%	Jumlah Pesantren yang terbantu dibagi dengan jumlah pasantren secara keseluruhan dikalikan 100%	Dinas Syariat Islam, Badan Pembinaan Pendidikan Dayah
		Persentase sarana dan prasarana tempat peribadatan yang optimal	%	Jumlah rumah ibadah yang terbantu dibagi dengan jumlah rumah ibadah secara keseluruhan dikalikan 100%	Dinas Syariat Islam, Badan Pembinaan Pendidikan Dayah
		Persentase Terciptanya pelaksanaan Syari'at Islam secara kaffah	%	Jumlah pertemuan majelis taklim dibagi dengan jumlah pertemuan majelis taklim tahun sebelumnya dikalikan 100%	Dinas Syariat Islam
		Terciptanya hafid-hafid yang handal di Kabupaten Aceh Barat Daya	%	Jumlah Hafid yang hafal Alqur'an 10, 20, 30 Juz	Dinas Syariat Islam

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Pembinaan Keagamaan Bagi Masyarakat	%	Jumlah pertemuan majelis taklim dibagi dengan jumlah pertemuan majelis taklin yang di jadwalkan dikalikan 100%	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama

23. SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH (MPD)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Rasio Kebutuhan Masyarakat mengenai kebutuhan Pendidikan	Pelaksanaan Pengawasan Komite Sekolah	%	Jumlah komite sekolah yang aktif dibagi dengan jumlah komite sekolah secara keseluruhan dikalikan 100%	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
2.	Cakupan sekolah yang telah memiliki Standar Pendidikan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mengenai Pendidikan	%	Jumlah evaluasi, monitoring dan pelaporang di bagi dengan jumlah keseluruhan sekolah yang ada di kali 100%	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah

24. SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH (MAA)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Perbaikan tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Tersedianya regulasi peradilan adat kabupaten	dokumen	ada/tidak	Sekretariat Majelis Adat Aceh
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengalaman nilai-nilai adat istiadat	Pengembangan dan Pelestarian adat istiadat serta nilai sosial budaya masyarakat	%	Jumlah adat istiadat dan nilai sosial bidaya yang telah di lestarikan dibagi dengan Jumlah adat istiadat dan nilai sosial bidaya yang ada dikalikan 100%	Sekretariat Majelis Adat Aceh
3.	Meningkatnya wawasan tokoh adat dalam masyarakat	Peran Lembaga adat dalam penegakan hukum adat di Gampong dan Mukim	%	Jumlah pelanggaran hukum adat yang terselesaikan dibagi dengan jumlah pelanggaran hukum adat yang terjadi dikali 100%	Sekretariat Majelis Adat Aceh

25. SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN (BMK)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Terciptanya sosial budaya masyarakat berdasarkan Syariat Islam	Meningkatnya Pengumpulan zakat dan Tersalurkanya zakat yang tepat sasaran	%	Jumlah Zakat yang tersalurkan dibagi dengan zakat yang terkumpul dibagi 100%	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten
2.		Cakupan Peningkatan ZIS (%)	ada/tidak	Jumlah penyaluran ZIS dibagi dengan Jumlah ZIS dikali 100%	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten

26. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kinerja dan pelayanan kepada masyarakat	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	%	Jumlah mobil pemadam kebakaran dibagi dengan Jumlah seluruh penduduk dikalikan 100%	Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten
2.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur dalam Pelayanan pada Pencegahan dan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	Persentase Petugas Pemadam Kebakaran per 1000 jumlah penduduk	%	1000 penduduk dibagi Jumlah penduduk di kalikan 100%	Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten
3.	Meningkatnya Sistem Kesiapsiagaan, Pencegahan Dini dan Penanggulangan Darurat Bencana	Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Selama Masa Tanggap Darurat	%	Jumlah Korban Bencana yang menerima Bantuan dibagi dengan jumlah korban bencana dikalikan 100%	Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten
		Adanya Pos Bantu Pemadam Kebakaran	%	Jumlah Armada Pemadam Kebakaran dibagi dengan Jumlah Pos Pemadam Kebakaran dikali 100 %	Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten
		Tersedianya Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Bencana Kabupaten	%	Jumlah Prosedur Tetap (Protap) dibagi dengan Jumlah (jenis) Bencana Kabupaten *100 %	Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten
		Waktu Respon Bencana Kebakaran	%	Jumlah Waktu Respon dibagi dengan Waktu yang dibutuhkan dalam Respon Bencana Kebakaran dikali 100 %	Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten

4.	Mewujudkan pengelolaan kebakaran dan bencana lainnya yang handal, dini, komprehensif	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	Jangkauan Luas WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) dibagi Luas Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya	Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten
----	--	-------------------------------------	---	--	--

27. SEKRETARIAT KORPRI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Terciptanya kinerja yang efektif dan efisiensi pada Sekretariat	Adanya Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum bagi anggota KORPRI dan operasionalnya		Jumlah ASN yang mendapat bantuan hukum : jumlah ASN yang berkasus di kali 100%	Sekretariat Korpri

28. RUMAH SAKIT UMUM TEUNGKU PEUKAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Mutu Kualitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Rujukan	Prosentase Pelayanan Terhadap Pasien Keluarga Miskin Yang Datang Ke Rumah Sakit	%	Jumlah pasien keluarga miskin yang dilayani rumah sakit / jumlah seluruh pasien keluarga miskin yang datang ke rumah sakit dikali 100%	RSUTP Kabupaten Aceh Barat Daya
		Cakupan pelayanan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	Jumlah peserta JKN yang dilayani dibagi jumlah total pasien yang datang dikali 100%	RSUTP Kabupaten Aceh Barat Daya

29. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	Prosentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	$(X/Y) \times 100\%$ X= jumlah ormas/okp/lsm yang terdaftar dan Aktif * Y= jumlah ormas/okp/lsm terdaftar	Kantor Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat Daya
2.	Meningkatnya SDM Aparatur menanggapi isu berkembang yang dapat meresahkan masyarakat dan dapat	Persentase Aparatur yang mendapatkan pendidikan khusus	%	Jumlah Aparatur yang telah mengikuti diklat Intelegen dibagi dengan jumlah Aparatur yang tersedia dikalikan 100%	Kantor Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat Daya

30. KECAMATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun gampong	Meningkatnya rasio usulan program yang tertampung		Jumlah Usulan program yang tertampung di bagi dengan jumlah usulan program gampong di kalikan 100%	Kecamatan
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	Hasil survey, Kepuasan Masyarakat (Permenpan 16 / 2014 dan SK Menpan No. 25/2004)	Kecamatan


BUPATI ACEH BARAT DAYA
AKMAL IBRAHIM